

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. A. YANI NOMOR 16 Telp. (0286) 591218
BANJARNEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pada gambaran umum ini akan kami uraikan tentang Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-goverment*, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-goverment*, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-goverment*, statistik dan persandian;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-goverment*, statistik dan persandian;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-goverment*, statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tergambarkan dalam Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Banjarnegara, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi Seksi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Komunikasi.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Goverment meliputi Seksi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi.
- e. Bidang statistik dan Persandian meliputi Seksi :
 - 1) Seksi Statistik; dan
 - 2) Seksi Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 didukung dengan personil berjumlah 56 (lima puluh enam) orang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang PNS, 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 8 (delapan) orang THL (Tenaga Harian Lepas), dan 12 (dua belas) orang *out sourching*.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika hingga akhir bulan Desember 2022 sejumlah 56 orang, terdiri dari 20 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau sekitar 35,7 persen dan 36 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 64,3 persen.

B. Permasalahan dan Isu Stategis

1. Permasalahan

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi dengan baik, permasalahan itu antara lain :

- a. Sistem informasi/aplikasi baik untuk administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik masih sangat sedikit yang terintergasi.
- b. Masih rendahnya Indeks SPBE yang mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi.
- c. Dokumen kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi SPBE masih banyak yang belum tersusun.
- d. Belum terbangunnya fasilitas jaringan internet desa WAN/LAN ke jaringan Banjarnegara Online.
- e. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
- f. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.

- g. Keterbatasan SDM yang menangani pelayanan informasi (PPID) dan pengaduan masyarakat.
- h. Data center yang belum dilakukan pembaharuan sejak diadakan.
- i. Belum optimalnya pengelolaan Satu Data Indonesia Daerah.
- j. Keamanan informasi keamanan aplikasi belum mendapat perhatian yang cukup.
- k. Belum optimalnya pemerdayaan komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi (KIM dan FK METRA mati suri).
- l. Perlunya peninjauan kembali Peraturan Bupati yang mengatur standarisasi biaya iklan di LPPL Radio Suara Banjarnegara.
- m. Belum optimanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja OPD.
- n. Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan laporan capaian ikhtisar kinerja (SAKIP).
- o. Masih kurangnya penyediaan wifi pada fasilitas umum.
- p. Belum optimalnya pengelolaan website di perangkat daerah.
- q. Personil Fokohumas di tiap OPD belum aktif dalam mengirimkan berita kegiatan OPD masing-masing untuk ditayangkan di website banjarnegarakab.go.id.
- r. Belum optimalnya perangkat daerah dalam mengupdate data Statistik Sektoral dalam portal open data dan satu data Kabupaten Banjarnegara
- s. Integrasi Data Statistik Sektoral yang belum maksimal.
- t. Masih rendahnya kesadaran OPD untuk melaporkan data Statistik sektoral ke Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika) dan masih belum menganggap pentingnya data untuk perencanaan pembangunan
- u. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.
- v. Pengamanan aplikasi di lingkup Pemkab Banjarnegara belum pernah dilakukan audit TIK

2. Isu Strategis

Isu-isu strategis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-goverment, Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara antara lain :

- a. Keterbukaan informasi publik harus ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kapasitas SDM yang menangani pengelolaan website banjarnegarakab.go.id, pelayanan informasi (PPID) dan pengaduan masyarakat. Di samping itu diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk membuat konten informasi.
- b. Dalam rangka implementasi SPBE dari 6 dokumen arsitektur SPBE baru 2 dokumen yang tersusun, yaitu dokumen Proses Bisnis dan Arsitektur Infrastruktur. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk SPBE dan

Peraturan Bupate Nomor 50 tahun 2020 tentang SPBE diperlukan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun non publik. Untuk itu diperlukan pengintegrasian SIM/aplikasi yang terkendala belum adanya regulasi penyusunan dan pengembangan SIM yang sesuai standar.

- c. Kualitas ketersediaan data statistik guna menunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan pada masing-masing perangkat daerah perlu ditingkatkan. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Daerah diperlukan kerjasama yang baik dari Pembina Data (BPS), Sekretaris Satu Data (Baperlitbang), Wali Data (Dinkominfo) dan produsen data di masing-masing OPD dalam menyediakan data yang berkualitas dan siap berbagi pakai.
- d. Keamanan Informasi maupun aplikasi dari serangan cyber harus ditingkatkan dengan membangun Sitem Keamanan Infromasi. Di samping itu diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keamanan informasi dan peningkatan SDM yang menangani persandian.

Sedangkan lingkungan strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 2 (dua) lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan strategis tersebut perlu diantisipasi agar tidak mempengaruhi kinerja lembaga, baik yang bersifat positif untuk terus dikembangkan dan yang bersifat negatif untuk dihindari.

Mendasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah guna mendukung Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan penyelenggaraan pemerintahan.

Peran Strategis organisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik dapat kita lihat pada 5 (lima) sasaran strategis yang hendak dicapai yakni :

- a. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan persandian;
- d. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat;
- e. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah/Meningkatnya nilai akuntabilitas

instansi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas maka ditetapkan 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019, yaitu :

- a. Program Aplikasi Informatika, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan tersebut diatas didukung dengan pelaksanaan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan yang terbagi pada :

Tabel 1 Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kominfo Kab. Banjarnegara 2022

No.	Bidang	Jumlah Kegiatan	Anggaran
1.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	: 6 Sub Kegiatan	Rp. 783.670.900
2.	Bidang Penyelenggaraan E-Government	: 5 Sub Kegiatan	Rp. 1.790.314.400
3.	Bidang Statistik dan Persandian	: 2 Sub Kegiatan	Rp. 53.075.900
4.	Sekretariat	: 12 Sub Kegiatan	Rp. 4.370.361.938
Total			Rp. 6.997.423.138

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022

Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara adalah sesuai dengan Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017 - 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Juga merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Perencanaan strategis ini juga mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 dan sekaligus untuk mendukung mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yaitu menuju Kabupaten ***“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”***.

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Banjarnegara dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara, selaras dengan RPJM Nasional 2017 - 2022 dan RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2005 – 2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang akan datang. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara memiliki harga diri yang lebih, saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional.

Dalam menterjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan setiap pokok visi yang ada di dalamnya dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu :

1. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini

ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

2. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedangkan makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 khususnya **Misi 2 : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik**. Maka diperlukan tujuan dan sasaran dari OPD yang terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika, menetapkan tujuan dan sasaran program sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- 2) Meningkatkan Pendayagunaan E-Goverment menuju Banjarnegara *Smart City*;
- 3) Meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; dan
- 4) Meningkatkan pelaksanaan persandian dan penyediaan data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan, yakni :
 - a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
 - b) Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap E-Government untuk Keterbukaan Informasi Publik, sasaran ini akan dicapai dengan 2 (dua) Program dan 2 (dua) kegiatan, yakni :
 - a) Program Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- b) Program Penyelenggaran Statistik Sektoral, Kegiatan Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - a) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Perjanjian Kinerja

Disini akan kami sampaikan Ringkasan/Ikhtisar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022, yang memuat informasi semua komponen dalam mencapai sasaran sesuai indikator kinerja yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 khususnya Misi 2 : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.

Kemudian Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara menetapkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja pada awal Tahun 2022, dengan Alokasi Anggaran murni sebesar *Rp. 7.240.290.038,- (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah)*.

Dengan tujuan utamanya “Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan Indikator Kinerja : “**Nilai Indeks SPBE**” dengan target **2,75**;

2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik, dengan indikator kinerja: “**Nilai Keterbukaan Informasi Publik**”, dengan target 90;
3. Meningkatnya kualitas layanan persandian, dengan indikator kinerja : “**Persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi**”, dengan target **60%**;
4. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat, dengan Indikator : **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**, dengan target NILAI sebesar 80;
5. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah/meningkatnya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dengan indikator : Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan target nilai : **B**.

Sedangkan rincian target Penetapan Kinerja dari masing-masing indikator kinerja Dinas (Eselon II) dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses jaringan teknologi informasi dan komunikasi		
1.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks SPBE	2,75
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap e-Government untuk keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan persandian	Persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi	60%
2	Terwujudnya pelayanan prima		
1.	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	B
	5 Sasaran	5 Indikator	

Pada tahun anggaran 2022 terdapat Perubahan Anggaran (pengurangan) sebesar **Rp. 242.866.900,-** sehingga anggaran menjadi sebesar **Rp. 6.997.423.138,- (enam milyar**

sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Demikian ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, adapun Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya 5 (lima) sasaran strategis tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Realisasi sampai Pada akhir Tahun Anggaran 2022, menunjukan bahwa 5 (lima) sasaran strategis tersebut, 5 (lima) sasaran strategis telah memenuhi target.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dilakukan dengan cara menyajikan *rincian hasil pengukuran kinerja Organisasi* dengan menganalisis *tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran*.

Adapun Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003.

Ada 2 (dua) rumus yang bisa digunakan, namun kami hanya memilih menggunakan rumus yang pertama yakni : *Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja*, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\sum \text{Realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100$$

Kemudian melakukan *analisis capaian kinerja dimaksud dengan* :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (*Tahun terakhir*);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (banyak perangkat daerah yang tidak mencantumkan perbandingan dengan standar nasional);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (ketercukupan SDM dan Sarpras bukan menjadi alasan dalam pencapaian/ketidakcapaian);
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
(Berapa program/kegiatan yang hilang/dipangkas dan berapa anggaran yang dihemat. Melihat program/kegiatan tahun sebelumnya dengan program/kegiatan tahun sekarang, dibandingkan Capaian Kinerja dengan anggaran yang digunakan);
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (pada indikator sasaran).

Adapun dari 5 (lima) sasaran strategis yang telah dicapai dengan 5 (lima) indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dapat dinarasikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Indeks SPBE**, dengan target nilai 2,75. Melalui evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PAN RB tahun 2022 diperoleh nilai 2,86 sehingga capaian kinerjanya sebesar 104 persen ;
2. Sasaran strategis yang ke dua yaitu : *Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Keterbukaan Informasi Publik**, dengan target nilai 90. Pada tahun 2022 komisi Keterbukaan Informasi Publik tidak melakukan review nilai Keterbukaan Informasi Publik. Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 termasuk Kabupaten yang kurang informatif, hal ini disebabkan karena dalam pengelolaan website yang belum terintegrasi (masih dikelola masing-masing bidang di Dinkominfo) antara website Pemkab Banjarnegaradi Bidang Penyelenggaraan e-Government, Website PPID di bidang Infokom dan Satu Data di Bidang Persandian dan Statistik. Untuk tahun 2023 diharapkan pengelolaan website bisa menjadi satu agar website banjarnegara lebih lengkap dan update dan Kabupaten Banjarnegara bisa masuk dalam kategori Kabupaten Informatif.
3. Sasaran strategis yang ketiga yaitu : Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian, dengan Indikator Kinerja : **Persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi**, dengan target 60%. Tahun 2022 melalui Sosialisasi Keamanan Informasi dan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE), realisasi sasaran sebesar 60% sehingga capaian kinerjanya 100 persen.
4. Sasaran strategis yang keempat yaitu : *Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat*, dengan Kinerja : **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** dengan target nilai 80 tercapai nilai 83,80 sehingga capaian kinerjanya adalah 104,75 persen;

5. Untuk sasaran strategis yang ke lima yaitu : *Meningkatnya Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah** dengan target predikat kategori B. Target tersebut di tahun 2022 bisa tercapai dengan nilai di 66,36, sehingga capaian kinerja yang bisa dicapai adalah 110,60 persen.

Kemudian dari uraian diatas, secara umum menunjukkan hasil yang baik, kemudian secara singkat dapat dijelaskan secara terperinci capaian kinerja tiap-tiap indikator sasaran, sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
-------------	--

Sasaran 1 : *”Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat”*, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : *Nilai Indeks SPBE*, yang pada tahun 2022 ditargetkan nilai 2,75. Indikator ini dipilih untuk mengukur sasaran 1 sesuai hasil review terhadap IKU Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan pada tahun 2019. Alasan pemilihan indikator ini karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi untuk memberikan layanan kepada pengguna diantaranya pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan evaluasi setiap tahun baik secara mandiri maupun oleh Menpan RB. Pada tahun 2022 melalui penilaian mandiri diperoleh nilai Indeks SPBE 2,86 sehingga memenuhi bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu 2,75. Hal tersebut dapat digambarkan sebagaimana Tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Indeks SPBE	2,75	2,86	104

Penilaian SPBE dilakukan terhadap 4 domain yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Nilai dari masing-masing domain adalah sebagai berikut :

No	Domain	Indeks
1	Kebijakan SPBE	4,20
2	Tata Kelola SPBE	2,40
3	Manajemen SPBE	1,55
4	Layanan SPBE	3,20
	Indeks SPBE	2,86

Nilai yang dicapai pada tahun 2022 ini menempatkan Banjarnegara termasuk pada kategori baik. Realisasi Nilai Indeks SPBE sudah memenuhi bahkan melampaui dari target yang sudah ditentukan yaitu 2,75. Hal yang sudah dicapai berkaitan dengan SPBE di Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah penyusunan Masterplan SPBE, Perda Nomor 50 Tahun 2021 tentang SPBE, Dokumen arsitektur Proses Bisnis dan Dokumen Arsitektur Infrastruktur. Kemudian capaian kinerja di analisis dengan :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks SPBE	2,75	2,86	104

Berdasarkan tabel dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 mencapai 100 %.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022, DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila realisasi kinerja dan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Nilai Indeks SPBE	1,93	100	2,52	109,57	2,42	96,8	2,86	104

Meskipun Nilai Indeks SPBE ditetapkan sebagai indikator Sasaran Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2019, namun karena penilaian SPBE sudah dilaksanakan mulai tahun 2018 maka dapat diperbandingkan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai Indeks SPBE pada 2 (tahun) pertama trennya mengalami kenaikan. Penurunan nilai yang dialami oleh hampir semua Instansi Pemerintah Daerah disebabkan adanya penambahan variabel penilaian.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA OPD, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	%
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	2,75	2,86	104

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 dibanding Target akhir Renstra OPD adalah 104 sehingga sudah bisa melampaui target akhir renstra yaitu 2,75. Artinya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sudah baik dalam pemanfaatan teknologi informasi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Namun masih perlu ada upaya yang sistematis agar SPBE di Kabupaten Banjarnegara mencapai tahapan dengan kategori yang SANGAT BAIK.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN;

Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas karena didukung dengan :

1. Sudah tersusunnya Masterplan SPBE sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPBE.
2. Sudah tersusunnya Perda No. 50 Tahun 2021 tentang SPBE sebagai payung hukum pelaksanaan SPBE

3. Koordinasi yang baik antara beberapa OPD yang menangani SPBE sesuai dengan bidang tugasnya (Dinas Komunikasi dan Informatika, Baperlitbang, Bagian Organisasi, Bagian Hukum)
4. Banyaknya OPD yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan secara online atau melalui aplikasi
5. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun pusat terkait regulasi yang ada;
6. Sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pendampingan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan OPD se Kabupaten Banjaregara terkait kegiatan e-goverment yang dilaksanakan;
7. Pemenuhan kebutuhan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memadai sehingga mendukung terlaksananya kegiatan.

Namun demikian ternyata tetap saja terdapat Permasalahan dalam pencapaian indikator antara lain yaitu :

1. Upaya integrasi antara berbagai aplikasi masih sulit dilaksanakan dikarenakan belum semua aplikasi atau SIM dibangun sesuai standar. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi penyusunan dan pengembangan SIM, sehingga belum terdapat standarisasi Pembangunan SIM.
2. Pusat Data Pemerintah (Data Center) yang belum memenuhi standar nasional.
3. Belum semua stakeholder memahami pentingnya implementasi SPBE dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Adapun solusi dalam rangka mengatasi terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Menyusun regulasi yang mengatur pembangunan SIM/aplikasi yang sesuai standar, sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait yang masuk dalam Tim Koordinasi SPBE dalam rangka implementasi SPE sesuai Masterplan SPBE.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi Dan Informatika.
4. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain diluar Pemda)

5. Dukungan Anggaran dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan dan layanan public berbasis elektronik.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1, Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Pelayanan kepada Masyarakat didukung oleh 1 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.790.314.400,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 1.675.699.783,- (93,60%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 114.614.617,- (6,40%), hal ini disebabkan terdapat sisa kontrak/ efisiensi pada sewa bandwidth, pada saat penagihan piutang Menara telekomunikasi tahap ke dua di serahkan secara langsung kepada pemilik menara, pada saat melakukan penagihan retribusi Menara sehingga sebagian tidak mengirimkan dokumen melalui pos, terdapat tenaga outsourcing yang mengundurkan diri per Juli 2022 sehingga gaji 6 bulan tidak terealisasi Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Aplikasi Informatika	1.790.314.400	1.675.699.783	93,60	100	114.614.617	6,40
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.293.710.000	1.204.317.933	93,09	100	89.392.067	6,91
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.293.710.000	1.204.317.933	93,09	100	89.392.067	6,91
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	496.604.400	471.381.850	94,92	100	25.222.550	5,08

2	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.602.100	8.623.900	81,34	100	1.978.200	18,66
3	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	44.203.000	36.248.000	82	100	7.955.000	18
4	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	231.860.000	220.707.000	95,19	100	11.153.000	4,81
5	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	209.939.300	205.802.950	98,03	100	4.136.350	1,97

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA. (PADA INDIKATOR SASARAN).

Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dicapai melalui 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan E-	1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2. Penatalaksanaan dan

		Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik
			4. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
			5. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Adapun program/kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja adalah Program Aplikasi Informatika dan subkegiatannya adalah Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Sasaran 2 :	Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik
-------------	--

1. Sasaran 2 : ” *Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik*”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja : *Nilai Keterbukaan Informasi Publik*, dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	-	-

6. Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan nilai yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Publik terhadap Badan Publik yang meliputi penilaian website konten informasi publik wajib berkala, penilaian Self Assesment Quisionare (SAQ), hasil visitasi verifikasi dan

hasil uji publik oleh penilai. Pada tahun 2022 komisi Keterbukaan Informasi Publik tidak melakukan review nilai Keterbukaan Informasi Publik. Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 termasuk Kabupaten yang kurang informatif, hal ini disebabkan karena dalam pengelolaan website yang belum terintegrasi (masih dikelola masing-masing bidang di Dinkominfo) antara website Pemkab Banjarnegara di Bidang Penyelenggaraan e-Government, Website PPID di bidang Infokom dan Satu Data di Bidang Persandian dan Statistik. Untuk tahun 2023 diharapkan pengelolaan website bisa menjadi satu agar website banjarnegara lebih lengkap dan update dan Kabupaten Banjarnegara bisa masuk dalam kategori Kabupaten Informatif.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 pada Sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi public	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	-	-

Berdasarkan Tabel dan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik dengan 1 Indikator Kinerja yaitu Nilai Keterbukaan Informasi Publik, untuk tahun 2022 Komisi Keterbukaan Informasi Publik tidak melakukan review atas Keterbukaan Informasi Publik, dan pada tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kategori Kabupaten kurang informatif karena belum terintegrasinya antara Website Pemkab dengan Website PPID dan Satu Data karena masih dikelola oleh masing-masing Bidang di Dinkominfo.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Dikarenakan Nilai Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan sebagai indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019, sehingga baru bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020.

Indikator Kinerja	Real isasi	2019		2020		2021		2022	
		Cap aian	Real isasi	Cap aian	Real isasi	Capai an	Real isasi	Cap aian	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			91 %	130	91	112,3	-	-
	1 Indikator	-	-	-	-		-		

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target RENSTRA SKPD diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target s/d 2022	Realisasi 2022	%
1	2	3	9	10
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	-	-

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Walaupun belum masuk dalam kategori Kabupaten Informatif namun tetap ada dukungan atas Capaian Kinerja antara lain :

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun pusat terkait regulasi yang ada;
2. Sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pendampingan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan OPD beserta seluruh lapisan masyarakat se Kabupaten Banjaregara terkait kegiatan penyebarluasan informasi yang dilaksanakan;

3. Pemenuhan kebutuhan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memadai sehingga mendukung terlaksananya kegiatan.

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi yang sudah dibentuk (KIM, FK METRA) tidak ada pembinaan secara berkesinambungan sehingga belum bisa berperan aktif dalam rangka desiminasi informasi.
2. Belum optimalnya peran PPID dan Fokohumas di tingkatan OPD dalam menyediakan informasi pembangunan kepada masyarakat
3. Kurang optimalnya kualitas ketersediaan data statistik guna menunjang perencanaan dan evaluasi pembangunan pada masing-masing perangkat daerah

Solusi terhadap permasalahan :

1. Menghidupkan kembali KIM dan FK METRA sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan OPD dalam penyediaan data dan informasi.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2, Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan di bidang Statistik dan Persandian. Di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang didukung dengan Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan total anggaran sebesar Rp. 783.670.900,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 712.710.278,- (90,95%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 70.960.622,- (9,05%). Hal ini disebabkan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik yang sedianya akan ada penambahan penyiar ternyata sampai akhir bulan Desember tidak ada penambahan penyiar sehingga anggaran yang sudah dianggarkan di Anggaran Perubahan tidak terealisasi. Adapun Program yang mendukung capaian kinerja Sasaran 2 di Bidang Statistik dan Persandian adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 31.450.900,- realisasi keuangan sebesar Rp. 30.450.900,- (96,82%) dan realisasi fisik sebesar 100%, sehingga terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- (3,18%). Analisis

efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		%	Rp
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	783.670.900	712.710.278	90,95	100	70.960.622	9,05
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	783.670.900	712.710.278	90,95	100	70.960.622	9,05
1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	22.444.300	22.044.300	98,22	100	400.000	1,78
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	266.082.000	263.670.800	99,09	100	2.411.200	0,91
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	309.558.500	250.912.078	81,05	100	58.646.422	18,95
4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	3.105.600	3.105.600	100	100	0	0
5	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	178.157.300	168.654.300	94,67	100	9.503.000	5,33
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	4.323.200	4.323.200	100	100	0	0
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	31.450.900	30.450.900	96,82	100	1.000.000	3,18
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	31.450.900	30.450.900	96,82	100	1.000.000	3,18
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	31.450.900	30.450.900	96,82	100	1.000.000	3,18

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 2 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik, dicapai melalui 1 (satu) program, 1 kegiatan dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 4. Pelayanan Infomasi Publik 5. Layanan Hubungan Media 6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian

Sasaran 3 : "Meningkatnya kualitas Layanan Persandian", diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja : *Percentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi*, dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi	60%	60%	100%

Indikator Persentase OPD yang Menggunakan Persandian sebagai Pengamanan baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 sebagai hasil review terhadap IKU Dinas Komunikasi dan Informatika, Indikator ini dipilih atas dasar pemikiran pengamanan informasi merupakan hal yang sangat diperlukan saat ini mengingat hampir semua informasi disediakan melalui aplikasi atau sistem informasi. Untuk itu diperlukan pengamanan informasi yang ada di semua OPD melalui persandian. Aplikasi surat dinas elektronik (TNDE) yang digunakan oleh semua OPD dan beberapa lembaga di sekitar Kabupaten menjadi sasaran pertama yang akan diamankan melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan surat dinas di lingkungan Pemkab oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan sudah terpasangnya jaringan Telepon/PABX di 34 OPD dari jumlah keseluruhan 44 OPD, dan terpeliharanya jaringan tersebut, maka upaya pengamanan informasi melalui jaringan PABX ini dapat terealisasi. Kemudian dengan sudah terselenggaranya sosisialisasi keamanan informasi yang diikuti oleh 6 orang Pranata Komputer dari 6 OPD serta 30 petugas keamanan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga upaya pengamanan informasi di masing-masing OPD dapat dilaksanakan.

Pengamanan informasi aplikasi yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 yakni penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada 5 (lima) aplikasi, yakni Aplikasi JITU (Pelayanan Satu Pintu Terpadu) pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Aplikasi KHS (Krakatau Hospital Sistem) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hj. Anna Lasmanah, Aplikasi SISMIOP dan SIMPATDA pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Aplikasi Srikandi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 pada Sasaran 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian	Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi	60%	60%	100%

Berdasarkan Tabel dan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian dengan 1 Indikator capaiannya 100%.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Dikarenakan Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi ditetapkan sebagai indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019, sehingga belum bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja tahu-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		2019		2020		2021		2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi			25%	100%	50%	50%	60%	100%
	1 Indikator	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel dan uraian diatas capaian Tahun 2022, sudah memenuhi target.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target RENSTRA SKPD diperoleh gambaran sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target s/d 2022	Realisasi 2022	%
1	2	3	9	10
1.	Persentase OPD yang menggunakan Persandian sebagai Pengamanan Informasi	60%	60%	100%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Walaupun Capaian kinerja mencapai 100%, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kompetensi SDM persandian yang masih kurang;
2. Sistem Keamanan Informasi yang belum terbangun dengan maksimal;

Solusi terhadap permasalahan :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bidang persandian dan telekomunikasi;
2. Kerja sama dan koordinasi yang lebih intens dengan BSSN dan OPD terkait ;

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persandian, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan di di bidang Statistik dan Persandian, yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 21.625.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 21.625.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		%	Rp
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	21.625.000	21.625.000	100	100	0	0
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.625.000	21.625.000	100	100	0	0
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	21.625.000	21.625.000	100	100	0	0

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian, dicapai melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Sasaran 4 : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran 4 : " Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ",

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : "Nilai Survey Kepuasan Masyarakat". Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	80	83,80	104,75%

Indikator Kinerja yang mendukung meningkatnya survey kepuasan masyarakat dapat kami illustrasikan sebagai berikut :

- 1) Indikator ke 1 (satu) yaitu Nilai Survey Kpuasan Masyarakat pada tahun 2022 diperoleh nilai 83,80 dengan pencapaian masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1.	Persyaratan	3,278
2.	Prosedur	3,341
3.	Waktu Pelayanan	3,107
4.	Biaya / Tarif	3,898
5.	Produk Layanan	3,340
6.	Kompetensi Pelaksana	3,362
7.	Perilaku Pelaksana	3,214
8.	Penanganan Pengaduan	3,575
9.	Kenyamanan Tempat Layanan	3,064

Pada tabel tersebut diatas diperoleh nilai indeks untuk pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 3,352 dan setelah dikonversikan dengan nilai nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 83,80. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di Kantor Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara adalah **BAIK**. Namun dari 9 unsur penilaian yang hasilnya kurang memuaskan adalah dari unsur Kenyamanan Tempat Layanan (Sarana dan Prasarana).

Indeks Kepuasan Masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat memenuhi target nilai 83,80 namun masih perlu peningkatan pelayanan khususnya pada unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perlu disederhanakan sehingga memudahkan bagi pengguna layanan.
2. Prosedur pelayanan. Tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan untuk lebih disederhanakan.

4. Waktu pelayanan. Jangka waktu yang diperlukan untuk setiap menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan untuk lebih efisiensikan waktunya.
5. Produk Pelayanan. Produk pelayanan yang dihasilkan untuk dievaluasi agar lebih tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kenyamanan Tempat layanan. Belum tersedianya tempat layanan yang representatif disebabkan masih menumpang di gedung secretariat Daerah. Sehingga perlu adanya gedung kantor tersendiri untuk Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Fasilitas tempat tunggu. Belum tersedianya tempat tunggu yang representatif disebabkan masih menumpang di gedung sekretariat Daerah. Sehingga perlu adanya gedung kantor tersendiri untuk Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Perilaku pelaksana. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan lebih baik lagi bagi pengguna layanan.
9. Maklumat Pelayanan. Komitmen untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart masih perlu ditingkatkan.
10. Penanganan Pengaduan. Penanganan pengaduan dan tindak lanjut masih perlu dievaluasi dan diperbaiki lagi agar pengaduan tersebut bisa segera tertangani.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Indikator Kinerja	2018	2019		2020		2021		2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,6	101,78 %	81,23	102,82 %	83,72	105,97 %	83,75	106,01 %
								83,80	104,75 %

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH/RENSTRA OPD DAPAT DILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2021	Capaian (4/3)*100

1	2	3	4	5
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	83,8	104,75%

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Target Renstra Dinkominfo 2022 untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar Nilai 80, telah terlampaui pada Tahun 2022 ini.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dengan OPD/SKPD beserta instansi terkait;
2. Komitmen dari aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung karena belum ada gedung kantor dan peralatan yang memadai
2. Kurangnya SDM khususnya di bidang teknis IT, programer dan jaringan, SDM persandian dan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Solusi terhadap permasalahan :

1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai sesuai unsur pelayanan;
2. Penambahan SDM dan peningkatan SDM di bidang IT.

Kesimpulan (diambil dari laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

1. IKM unit pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar : 83,80 (Kategori B) ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat sudah ideal dengan predikat atau tingkatan PUAS.
2. Bawa pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika suah baik, namun demikian masyarakat / pengguna layanan berharap lebih ditingkatkan lagi.
3. Pelayanan informasi terkadang membutuhkan lama, hal ini terkait dengan jaringan IT yang kadang mengalami kendala.

REKOMENDASI (diambil dari laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara) sebagai berikut :

1. Untuk dapat lebih maksimal dalam pelayanan maka sebaiknya Dinas Komunikasi dan Informatika diberi sarana dan prasarana layanan public tersendiri (Gedung dan sarana prasarana penunjang lainnya).
2. Dalam rangka mewujudkan komitmen public ke arah yang lebih baik, maka survey tentang opini public dalam hal kepuasan masyarakat atas Pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika akan dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4, Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, didukung oleh 1 program, 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan di Sekretariat. Program yang mendukung capaian tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 4.370.361.938,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.830.146.024 (87,64%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 540.215.914,- (12,36%). Hal ini disebabkan perhitungan atas antisipasi kekurangan gaji ASN dan kenaikan tambahan penghasilan ASN. Namun sampai dengan akhir tahun 2022 tidak terdapat kenaikan tambahan penghasilan ASN, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap prosentase penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.370.361.938	3.830.146.024	87,64	100	540.215.914	12,36
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.808.750.665	3.279.751.130	86,11	100	528.999.535	13,89

1	Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.717.750.665	3.188.751.130	85,77	100	528.999.535	14,23
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.000.000	91.000.000	100	100	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.572.500	206.267.150	99,85	100	305.350	0,15
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.997.200	4.997.200	100	100	0	0
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.775.300	178.769.950	100	100	5.350	0,003
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.800.000	22.500.000	100	100	300.000	1,32
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.689.293	245.390.264	95,97	100	10.299.032	4,03
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	46.107.879	89,36	100	5.492.121	10,64
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.089.293	199.282.385	97,64	100	4.806.908	2,36
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.600.480	95.988.480	99,37	100	612.000	0,63
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	57.173.000	56.961.000	99,63	100	212.000	0,37

9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	16.977.480	16.577.480	97,64	100	400.000	2,36
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.450.000	22.450.000	100	100	0	0

6. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PENGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 4 : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, didukung dengan melalui 1 (satu) program dengan 4 (empat) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		<p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
--	--	---	--

Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat yang memperoleh pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan survey kepuasan yaitu seluruh OPD dan Instansi terkait.

Sasaran 5 :	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah
-------------	--

Sasaran 5 : " Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah ". Untuk mencapai sasaran tersebut diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Nilai AKIP OPD dengan hasil penilaian pada tahun 2022 sebagai berikut :

Pada tahun 2022 memperoleh nilai dari 66,36 dengan pencapaian masing-masing komponen penilaian sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Rata-rata
1.	Perencanaan kinerja	30%	19,76
2.	Pengukuran kinerja	25%	15,63
3.	Pelaporan kinerja	15%	10,03
4.	Evaluasi internal	10%	5,94
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20%	15,00
Penilaian		100%	66,36

Pada tabel tersebut diatas setelah dikonversi diperoleh nilai sebesar 66,36 dengan kategori B.

1. MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	>60,00	66,36	110,60
	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	B	B	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah Kategori B dengan Nilai di atas 60 (>60), dari hasil Penilaian Tim Sakip Kabupaten Banjarnegara memperoleh Nilai sebesar 66,36 dengan kategori B.

2. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

Indikator Kinerja	2018	2019		2020		2021		2022			
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	53,33	105,60	55,03	91,70	62,69	104,47	60,30	101,48	66,36	110,60
		C		B		B		B		B	

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH/RENSTRA OPD DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	>60	66,36	110,60%

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Target Renstra Dinkominfo 2022 untuk Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar Nilai Di atas 60 dengan Kategori B, sedangkan pada Tahun 2022 ini telah mencapai nilai 66,36 sehingga sudah melampaui target Renstra 2022.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Koordinasi yang baik antara Sekretariat sebagai penyusun dan pengumpul data SAKIP dengan bidang-bidang ;
2. Komiten dari Pimpinan dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Belum terdokumentasi dengan baik data-data yang diperlukan untuk proses evaluasi SAKIP;
2. Kompetensi SDM dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja.

Solusi terhadap permasalahan :

1. Penertiban data perencanaan dan evaluasi kinerja;
2. Peningkatan kompetensi SDM perencana.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5, Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan di Sekretariat. Program yang mendukung capaian tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 2.749.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 2.749.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%, Jumlah anggaran yang sangat kecil dan hanya diperuntukkan makan minum rapat penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Efisiensi didapatkan dari pemanfaatan anggaran yang kecil tersebut untuk tetap memenuhi target kinerja 100 %, yaitu tersusunnya dokumen perencanaan 3 dokumen dan dokumen pelaporan sebanyak 7 dokumen. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		%	Rp
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.749.000	2.749.000	100	100	0	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.374.500	1.374.500	100	100	0	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.374.500	1.374.500	100	100	0	0

6. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 5 : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah, didukung dengan melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) diperoleh dari evaluasi oleh Inspkitorat atas Sistem AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Evaluasi ini dilakukan terhadap 5(lima) komponen besar yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Hasil Evaluasi dengan nilai 66,36 dengan kategori **B atau Baik** dengan interpretasi Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja Akuntabilitas bidang keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran.

Untuk alokasi anggaran Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 605.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 504.031.513,- sehingga masih kurang dari target sebesar Rp. 100.968.487,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran Pendapatan	Realisasi Anggaran Pendapatan	Surplus/ Defisit	%
1.	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	450.265.293	- 49.734.707	90,05
2.	Hasil Kerja Sama Daerah	105.000.000	53.004.100	- 51.995.900	50,48
3	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0	762.120	762.120	
Jumlah		605.000.000	504.031.513	100.968.487	83,31

Untuk membiayai operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 mendapat anggaran sebesar Rp. 7.240.038,- dan setelah mengalami revisi-revisi termasuk anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika berkurang sebesar Rp. 242.866.900,- sehingga menjadi Rp. Rp. 6.997.423.138,- atau mengalami pengurangan sebesar 3,35%. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 6.270.631.985,- atau sebesar 89,61 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.370.361.938	3.830.146.024	87,64
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	783.670.900	712.710.278	90,95
3	Program Aplikasi Informatika	1.790.314.400	1.675.699.783	93,60
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	31.450.900	30.450.900	96,82
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	21.625.000	21.625.000	100
	Jumlah	6.997.423.138	6.270.631.985	89,61

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (empat) kegiatan dan 12 (duabelas) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.374.500	1.374.500	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.374.500	1.374.500	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3	Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.717.750.665	3.188.751.130	85,77
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.000.000	91.000.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.997.200	4.997.200	100
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.775.300	178.769.950	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.800.000	22.500.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8	Penyediaan Jasa Komunikasi,	51.600.000	46.107.879	89,36

	Sumber Daya Air dan Listrik			
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.089.293	199.282.385	97,64
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	57.173.000	56.961.000	99,63
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	16.977.480	16.577.480	97,64
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.450.000	22.450.000	100
	JUMLAH	4.370.361.938	3.830.146.024	87,64

Total anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 4.370.361.938,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.830.146.024,-. Realisasi keuangan yang sebesar 87,64% ini disebabkan karena belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak maksimal terserap dikarenakan perhitungan atas antisipasi kekurangan gaji ASN dan kenaikan tambahan penghasilan ASN. Namun sampai dengan akhir tahun 2022 tidak terdapat kenaikan tambahan penghasilan ASN, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap prosentase penyerapan anggaran. Disamping itu terdapat penambahan anggaran untuk antisipasi terjadinya kekurangan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena ada penambahan/ Pembangunan gardu listrik (shelter) Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) Banjarnegara agar siaran radio bisa di terima di wilayah yg lebih luas

Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	22.444.300	22.044.300	98,22
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	266.082.000	263.670.800	99,09

3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	309.558.500	250.912.078	81,05
4	Pelayanan Informasi Publik	3.105.600	3.105.600	100
5	Layanan Hubungan Media	178.157.300	168.654.300	94,67
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	4.323.200	4.323.400	100
	JUMLAH	783.670.900	712.710.278	90,95

Total anggaran program Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 783.670.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 712.710.278,- Realisasi keuangan yang sebesar 90,95% ini disebabkan karena pada Belanja jasa tenaga pelayanan umum pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada anggaran perubahan direncanakan akan menambah tenaga penyiar, sehingga ditambahkan sebanyak rencana penambahan tenaga tersebut tetapi sampai bulan Desember tahun 2022 tidak terlaksana penambahan tenaga.

Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.293.710.000	1.204.317.933	93,09
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.602.100	8.623.900	81,34
3	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	44.203.000	36.248.000	82,00

	Pemerintahan Berbasis Elektronik			
4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	231.860.000	220.707.000	95,19
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	209.939.300	205.802.950	98,03
	JUMLAH	1.790.314.400	1.675.699.783	93,60

Program Aplikasi Informatika Total anggaran sebesar Rp. 1.790.314.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.675.699.783,-. Realisasi keuangan yang hanya sebesar 93,60% ini disebabkan karena pada Sub Kegiatan Anggaran tidak terserap pada sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di karenakan pada saat penagihan piutang Menara telekomunikasi tahap ke dua di serahkan secara langsung kepada pemilik menara pada saat melakukan penagihan retribusi Menara sehingga sebagian tidak mengirimkan dokumen melalui pos. hal tersebut berpengaruh terhadap penyerapan anggaran tahun 2022 di sub kiatan ini. Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik di karenakan terdapat tenaga outsourcing yang mengundurkan diri per Juli 2022 sehingga gaji 6 bulan tidak terealisasi.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	31.450.900	30.450.900	96,82

Total anggaran program ini sebesar Rp 31.450.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 30.450.900,- atau sebesar 96,82%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan adanya honorarium narasumber yang tidak terambil karena efisiensi anggaran (rapat yang sedianya dilaksanakan dua kali, tapi terlaksana satu kali).

Program Penyelenggaraan Persaandian dan Pengamanan Informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan, dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	21.625.000	21.625.000	100

Total anggaran program ini sebesar Rp 21.625.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 21.625.000,- atau sebesar 100%. Realisasi anggaran tercapai 100%.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, LKjIP ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

BAB IV **PENUTUP**

Secara umum Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara pada tahun anggaran 2022, dengan 5 (lima) Sasaran Strategis serta 5 Indikator Kinerja, sudah cukup baik. Dengan perincian Capaian sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Indeks SPBE**, dengan target 2,75 terealisasi 2,86 sehingga Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 104 persen ;
2. Sasaran strategis yang ke dua yaitu : *Meningkatnya akses masyarakat terhadap E-Government untuk keterbukaan informasi publik*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Keterbukaan Informasi Publik**, dengan target 90 terealisasi 100, sehingga Capaian Kinerjanya mencapai 111,11 persen; (tidak ada review terhadap keterbukaan informasi publik), masuk kategori informatif, cukup informatif atau kurang/tidak informatif.
3. Sasaran strategis yang ketiga yaitu : Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian, dengan Indikator Kinerja : **Persentase OPD yang menggunakan persandian sebagai pengamanan informasi**, dengan target 60%. Tahun 2022 melalui Sosialisasi Kemanan Informasi dan persiapan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) target ini dapat terealisasi sebesar 60%, sehingga capaiannya kinerjanya adalah 100%.
4. Sasaran strategis yang keempat yaitu : *Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** dengan target nilai 80 tercapai nilai 83,8 sehingga capaian kinerjanya adalah 104,75 persen;
5. Untuk sasaran strategis yang kelima yaitu : *Meningkatnya Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah*, dengan Indikator Kinerja : **Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah** dengan target predikat kategori B. Target tersebut di tahun 2022 bisa tercapai dengan nilai di 66,36, sehingga capaian kinerja yang bisa dicapai adalah 110,60 persen.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022, rata-rata telah mencapai target-target yang telah ditetapkan/direncanakan, hal ini disebabkan :

- a. pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan terarah, sesuai dengan apa yang direncanakan, dengan ditopang oleh alokasi anggaran yang ada.
- b. Kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kegiatan di Bidang Pengembangan E-Government, seperti di Kegiatan Pengembangan E-Government, Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, dan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, ini sangat mendukung peningkatan kualitas layanan public.

- b. Kurangnya pembinaan pada pengelola WEB OPD;
- c. Kurang dukungan Anggaran yang memadai di tingkat OPD;
- d. Belum adanya aplikasi pelaporan data sektoral yang terintegrasi secara terpadu;
- e. Belum optimalnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sandi dan Telekomunikasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain di luar Pemda);
- c. Dukungan Anggaran guna pengembangan E-Government di masing-masing OPD;
- d. Mengupayakan tersedianya aplikasi pelaporan data sektoral;
- e. Mengupayakan adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas bagi SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.

Sebagai kata penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten banjarnegara Tahun Anggaran 2022, yakni bahwa Tim Kerja kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang ada guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten banjarnegara Tahun Anggaran 2022.

Namun demikian apabila dalam penyusunan LKjIP ini dipandang masih terdapat kekurangan kami menerima saran masukan dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini.

Demikian laporan ini kami buat semoga dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, 16 Januari 2023



Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
- 2) Format LKJIP;

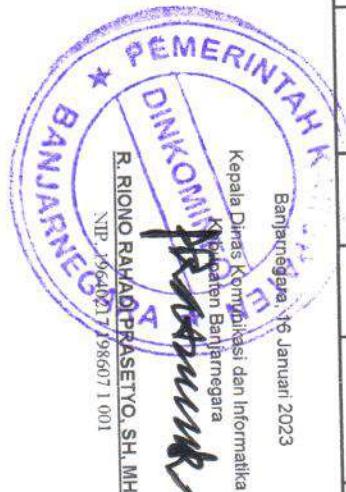
Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
- 2) Format LKJIP;

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022

Triwulan I	Indikator RPJMD	Indikator Sasaran	Kinerja	Realisa	Program	Indikator Program	Kinerja			Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja			Anggaran			
							Target	Realisasi	Target				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	11	12	13	14	15	16	17	18		
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks SPBE	2.75	Program Aplikasi Informatika	Jumlah SIM yang mendukung pelayanan public	Jumlah SIM	44 SIM	9	13	1.790.314.400	152.065.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatausahaan dan Pengawasan e-government dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitoring dan diawasi	226 menara	226 menara	10.502.100	-	-
				Jumlah website pemerintah yang aktif dan update	59 website														
2	90	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi bagi masyarakat	100	783.670.900	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pengelolaan website banjarnegarakab.go.id, media sosial dan aplikasi pelaporan / aduan masyarakat	12 bulan	12 bulan	22.444.300	-							

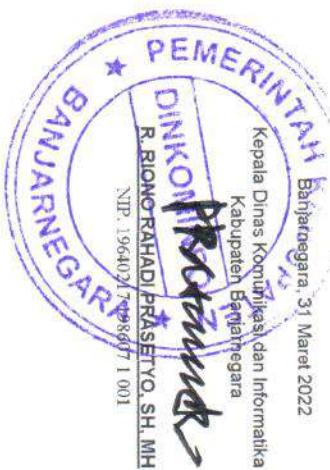
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100%	4.370.381.938	3.830.146.024	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji ASN	1 tahun	1 tahun	3.717.750.685	477.195.791
			Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan daerah	100%			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelola Keuangan OPD yang diperlui harus pembayarannya	12 bulan	12 bulan	91.000.000	-	
			Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparat	100%			Administrasi Penyediaan Peralatan dan Periengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan periengkapan kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	4.997.200	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	11 paket	11 paket	178.775.300	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Bahan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia	276 eksp	276 eksp	22.800.000	-	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Jumlah pembayaran listrik THL pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus terpenuhi perbayaran	12 bulan	12 bulan	51.600.000	-	
			Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terpenuhi pembayaran STNK nya	9 orang	9 orang	204.089.293	-	
			Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	16.977.480,00	-	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tepelitiananya perlegkan dan perakitan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	22.450.000,00	-	



REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022

Triwulan II		Indikator RPJMD	Indikator Sasaran	Kinerja		Anggaran		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Anggaran		
No	Target			Realisa	Target	Realisa	Target				Target	Realisa	Target	Realisa	
1	2	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks SPBE	2,75	Program Aplikasi Informatika	Jumlah SIM yang mendukung pelayanan public	44 SIM	1.790.314.400	438.460.010	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domai di Lingkup Pemerintah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 sistem	2 sistem	1.293.710.000	359.106.110
						Jumlah website pemerintah yang website aktif dan update	59			Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitoring dan diawasi	226	226	10.602.100	5.796.300
										Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SPBE yang tersedia	1	1	44.203.000	16.663.000
										Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah laporan yang dimonitoring dan diawasi	4 lisensi	4 lisensi	231.860.000	28.300.000
										Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dikembangkan jaringan infrastukturnya	44 opd	44 opd	209.939.300	28.594.600
2	90	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Program Komunikasi dan Informasi Publik	100	Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat	783.670.900	151.020.378	Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pengelolaan website banjarnegarakab.go.id, media sosial dan aplikasi pelaporan / aduan masyarakat	12 bulan	12 bulan	22.444.300	12.044.300	

4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100%	4.370.361.938	3.830.146.024	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penempatannya gaji dan pembayaran ASN	1 tahun	1 tahun	3.717.750.665	1.503.022.624
			Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan daerah	100%			Pelaksanaan Perataan/penyiangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan yang dipenuhi pembayarannya	Pengadaan OPD yang harus	12 bulan	12 bulan	91.000.000	22.500.000
			Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana apparatur	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	4.997.200	1.443.800
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan logistik yang tersedia	Surat kabarmajalah yang tersedia	11 paket	11 paket	17.877.300	7.1223.712
			Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon	Jumlah PTT dan THL pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus tersedia	9 orang	9 orang	204.089.293	92.281.651
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Blaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dan perangkat yang harus dipelihara	STNK nya	4 unit	4 unit	57.173.000.00	26.077.000
			Pemeliharaan/Rehab illas, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehab illas, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharaanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	22.450.000.00	6.010.000	



REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022

Triwulan III		Indikator RPJMD	Indikator Sasaran	Kinerja		Indikator Program	Kinerja		Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja		Anggaran	Realisasi	
No	Target			Realisasi	Target		Target	Realisasi						Target	Realisasi			
1	2	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks SPBE	2,75	Program Aplikasi Informatika	Jumlah SM yang mendukung pelayanan publik	44 SM	1.790.314.400	998.356.280	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Dom lain di Lingkup Pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	14	15	16	17	18	
						Jumlah website pemerintah yang aktif dan update	59											
2	90	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	100	Percentase disseminasi informasi bagi masyarakat	Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	783.670.900	399.174.378	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pengelolaan website beranegarakab.go.id media sosial dan aplikasi pelaporan / aduan masyarakat	12 bulan	12 bulan	22.444.300	18.044.300			

4	Nilai Survey Kepiaskan Masyarakat	80	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100%	4.370.381,938	3.830.146,024	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan pembayaran gaji	1 tahun	1 tahun	3.717.750.665	2.434.296.546
			Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelola Keuangan OPD yang dipenuhi	12 bulan	12 bulan	91.000.000	46.000.000	
			Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan daerah	100%			Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perengkapan kebersihan Kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	4.997.200	2.918.500	
			Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparat				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	11 paket	11 Paket	17.8.775.300	129.553.727	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Bahan Baku/Infrastruktur Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/infrastruktur yang tersedia	276 eksp	276 eksp	22.800.000	16.875.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Teipenuhinya pembayaran listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	51.600.000	34.842.495	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus tersedia	9 orang	9 orang	20.4.089.293	139.030.084	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pajak dan Perizinan	Jumlah kendaraan dan peralatan dan peralihan yang tersedia	4 unit	4 unit	57.173.000,00	31.539.000	
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	STNK nya					
			Pemeliharaan dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	15.977.480,00	12.577.480	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12 bulan	12 bulan	22.450.000,00	15.103.000	



REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022

No	Indikator RPJMD	Indikator Sasaran	Kinerja			Indikator Program	Kinerja			Indikator Kegiatan	Kinerja						
			Realisasi		Program		Realisasi		Anggaran		Target	Realisasi	Anggaran				
			Target	Realisasi	Target		Target	Realisasi	Target		Target	Realisasi	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks SPBE	2,75	2,86	Program Aplikasi Informatika	Jumlah SIM yang mendukung pelayanan publik	44 SIM	47 SIM	1.790.314.400	1.675.69.783	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domai di Lingkup Pemerintah	Penyelelyaragaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 sistem	2 sistem	1.293.710.000	1.204.317.933
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	90	Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat	100	100%	783.670.900	712.710.278	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitoring dan diawasi	226 menara	226 menara	10.602.100	8.623.900			
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	90	Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat	100	100%	783.670.900	712.710.278	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SPBE yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	44.203.000	36.248.000			
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	90	Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat	100	100%	783.670.900	712.710.278	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah lisensi layanan penunjang dan support TNDE yang disediakan	4 lisensi	4 lisensi	231.860.000	220.707.000			
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	90	Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat	100	100%	783.670.900	712.710.278	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dipelihara dan dikembangkan jaringan infrastrukturnya	44 opd	44 opd	209.939.300	205.802.950			

	Pengelolaan Konten hasil Pengelolaan dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen 6 dokumen	266.082.000	263.670.800
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media 1 jenis	309.558.500	250.912.078
	Pelayanan Media Publik	Jumlah dokumentasi dan informasi 3	3.105.600	3.105.600
	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media 6 layanan	178.157.300	168.654.300
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1 kegiatan	4.323.200	4.323.200
	Penyelenggaraan Sirkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Sektoral	Jumlah BDA, metadata dan statistik sektorai yang diterak 30 buku	31.450.000	30.450.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektorai di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku 30 buku	31.450.000	30.450.000
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorai	Percentase 100% 100% 31.450.900 30.450.900	21.625.000 21.625.000	21.625.000 21.625.000
	Percentase OPD 60%	Percentase OPD 60% Program Penyelenggara yang menggunakan persandian untuk Pengamanan sebagai pengamanan informasi	21.625.000 Pelaksanaan Keamanan informasi dimonitoring atau komunikasi dan persandiannya	21.625.000 Pelaksanaan Keamanan informasi dimonitoring atau komunikasi dan persandiannya

4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	83,8	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.370.361.938	3.830.146.024	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran ASN	1 tahun	1 tahun	3.717.750.665	3.188.751.130
				Prosentase terpenuhinya administrasi keuangan daerah	100%	100%				Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelola Keuangan yang dipenuhi pembayarannya	OPD harus membayarannya	12 bulan	12 bulan	91.000.000	91.000.000
				Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatuar	100%	100%				Penyediaan Perilatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perilatan dan perlengkapan kebersihan kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	4.997.200	4.997.200	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	11 paket	11 paket	178.775.300	178.769.950	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kabar/majalah yang tersedia	276 eksp	276 eksp	22.800.000	22.500.000	
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	51.600.000	46.107.879	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang tersedia	9 orang	9 orang	204.089.293	199.282.385	
										Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang harus membayarannya	4 unit	4 unit	57.173.000,00	56.961.000	
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan terpenuhi pembayaran STNK nya					
										Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	16.977.480,00	16.577.480	
										Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharaanya dan perilakunya dan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	22.450.000,00	22.450.000	

